

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa (Siagian, 2005 dalam Kato, et al, 2021). Indonesia merupakan negara berkembang yang pada dasarnya konsep pembangunan dalam negara berkembang yaitu merujuk pada suatu keadaan taraf rendah menuju taraf yang tinggi yaitu modernisasi dengan harapan akan tercapainya kehidupan masyarakat yang lebih maju, makmur, dan berkembang, serta variable-variabel dalam pembangunan dapat mengalami perubahan kearah yang lebih baik.

Tujuan dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perlunya distribusi pendapatan yang merata dan peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data produk domestik bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun dapat diketahui dari PDB atas dasar konstan.

**Tabel 1.1 Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan
(Milyar Rupiah) dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%)
Tahun 2015-2020**

Tahun	PDB ADHK	Pertumbuhan
2015	8.982.517,10	4,88
2016	9.434.613,40	5,03
2017	9.912.928,10	5,07
2018	10.425.851,90	5,17
2019	10.949.155,40	5,02
2020	10.723.054,80*	-2,07*

*)Angka sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

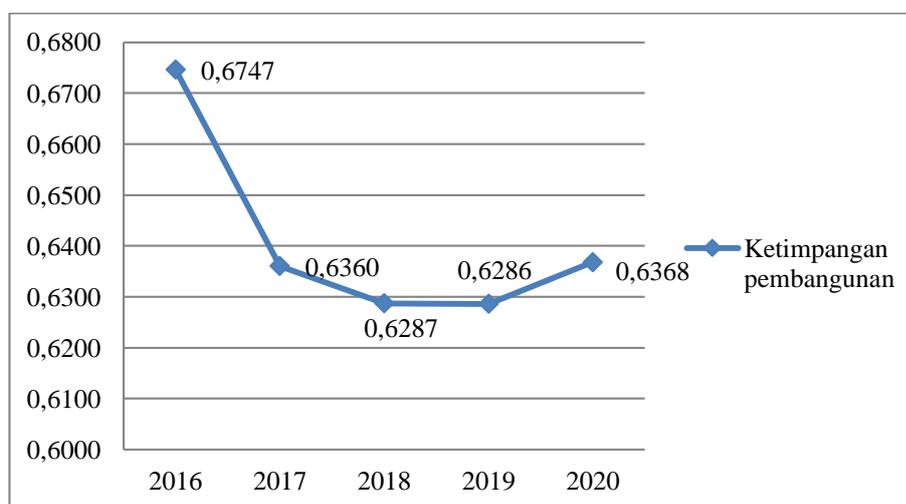
Berdasarkan Tabel 1.1, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahunnya. Akan tetapi, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun karena penurunan produksi barang dan jasa akibat kebijakan penanggulangan Covid-19 termasuk pembatasan sosial berskala besar.

Pertumbuhan ekonomi yang cepat jika tidak diimbangi dengan pemerataan akan menimbulkan ketimpangan antar wilayah. Indonesia terdiri dari beberapa provinsi yang memiliki perbedaan di setiap wilayahnya berupa karakteristik alam, sosial, ekonomi, dan sumber daya, perbedaan itulah yang akan menimbulkan ketimpangan pembangunan.

Dampak positif dari ketimpangan pembangunan yaitu dapat mendorong peningkatan kesejahteraan wilayah yang kurang maju dan berkembang untuk dapat bersaing dalam meningkatkan pertumbuhannya. Dampak negatif dari ketimpangan pembangunan yang parah antara lain adalah apabila tidak maksimalnya pemanfaatan dan peningkatan ekonomi, akan melemahkan stabilitas

dan solidaritas sosial, serta tidak adanya keadilan bagi kesejahteraan masyarakat (Todaro, 2004).

Salah satu indikator ketimpangan pembangunan adalah Indeks Williamson. Perhitungannya menggunakan PDRB per kapita per wilayah dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per wilayah. Nilainya berkisar antara 0 (pemerataan yang sempurna) sampai dengan 1 (ketimpangan yang tinggi). Pulau Jawa yang dikenal sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan merupakan salah satu pulau paling timpang di Indonesia, angka ketimpangan atau Indeks Williamson di Pulau Jawa pada tahun 2020 adalah 0,6368, menunjukkan angka ketimpangan yang tinggi karena lebih dari 0,5 dan mendekati angka 1.

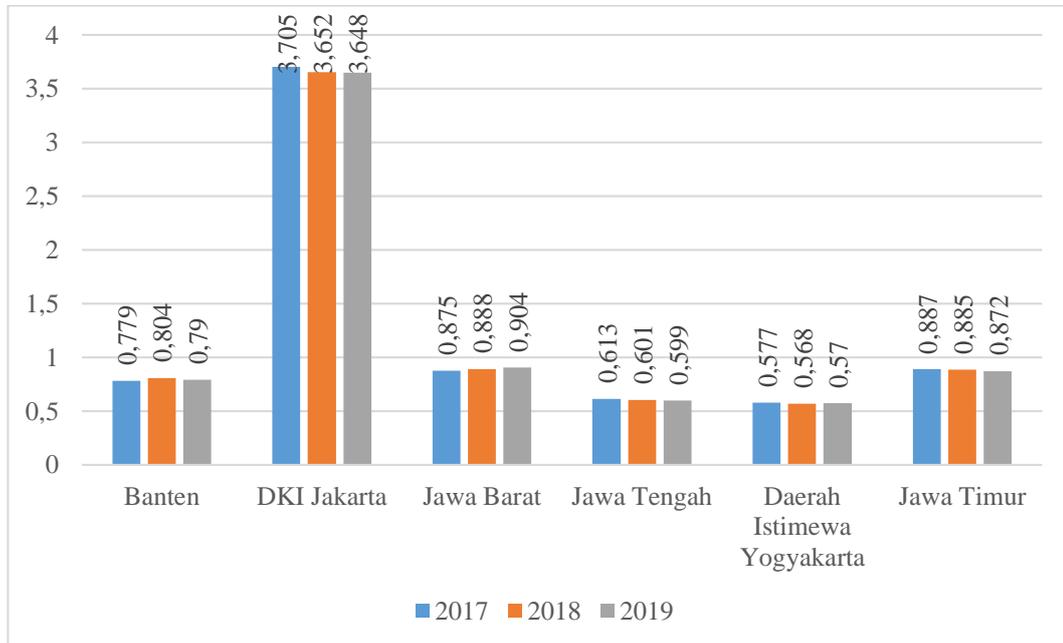


Gambar 1.1 Perkembangan Indeks Williamson Pulau Jawa Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Gambar 1.1 menunjukkan tingkat ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa yang mengalami fluktuasi menurun, rata-rata Indeks Williamson di Pulau Jawa tahun 2016-2020 sebesar 0,641 menunjukkan ketimpangan pembangunan yang masih cukup tinggi. Selain itu, di Pulau Jawa terdapat enam provinsi dengan tingkat

ketimpangan pembangunan yang tinggi pula, dihitung menggunakan PDRB perkapita relatif yang dipopulerkan oleh Jaime Bonet (2006).



Gambar 1.2 Angka Ketimpangan Pembangunan pada Enam Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2017-2019

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa ketimpangan pembangunan pada enam provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2017-2019 memiliki tingkat ketimpangan tinggi yaitu jauh dari angka 0 menandakan ketimpangan yang tinggi dan sebagian besar mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, ketimpangan paling tinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta dengan angka ketimpangan 3,648 dan ketimpangan paling rendah yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan angka ketimpangan 0,570.

Aglomerasi atau pemusatan kegiatan ekonomi termasuk faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan. Wilayah yang termasuk ke dalam aglomerasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena

bertambahnya pendapatan masyarakat dan tersedianya lapangan pekerjaan. Wilayah lainnya yang tidak termasuk aglomerasi akan menyebabkan wilayah tersebut semakin tertinggal. Hal itulah yang akan menyebabkan ketimpangan antar wilayah apabila dilakukannya pemusatan ekonomi hanya di satu wilayah saja. Aglomerasi dapat ditentukan dari seberapa besar kontribusi PDRB suatu wilayah terhadap pembentukan PDRB dalam wilayah tersebut (Bonet, 2006).

Tabel 1.2 Aglomerasi pada Enam Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2017-2019

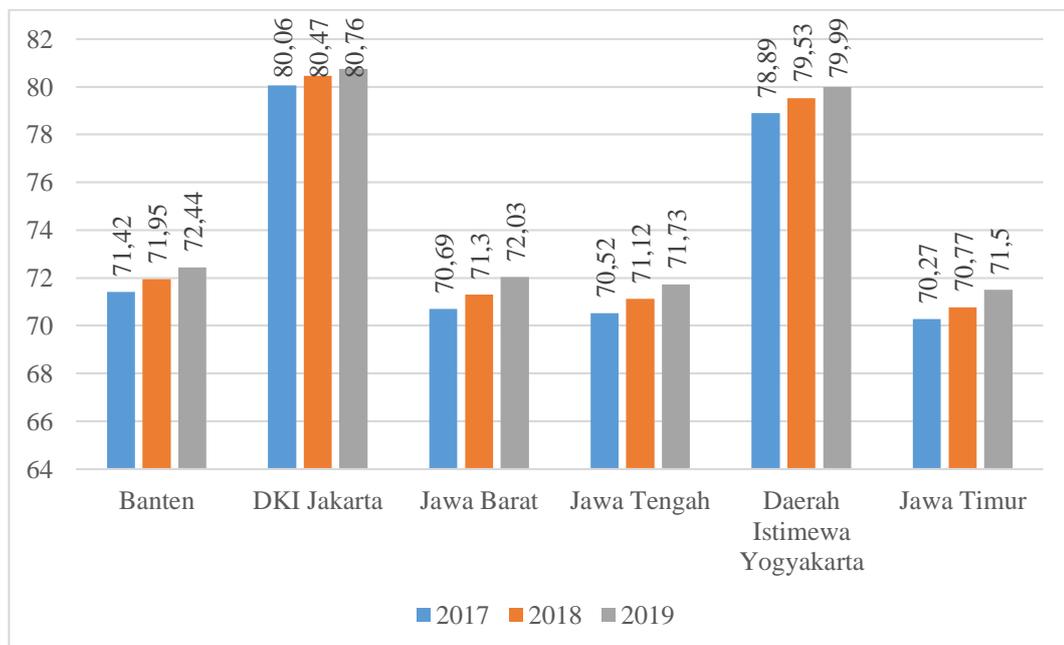
Provinsi	Aglomerasi		
	2017	2018	2019
Banten	0,04163	0,04188	0,042
DKI Jakarta	0,16497	0,16643	0,1677
Jawa Barat	0,180409	0,18821	0,19409
Jawa Tengah	0,09016	0,09027	0,9059
Daerah Istimewa Yogyakarta	0,00931	0,0094	0,00954
Jawa Timur	0,14952	0,15217	0,15067

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Pada Tabel 1.2 dapat dilihat selama tahun 2017-2019 tingkat aglomerasi di Pulau Jawa berbeda di tiap provinsinya. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan pemusatan kegiatan ekonomi paling tinggi dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan pemusatan kegiatan ekonomi paling rendah. Pemusatan kegiatan ekonomi yang hanya terjadi pada wilayah maju di Pulau Jawa akan menimbulkan ketimpangan antara wilayah maju dan wilayah terbelakang.

Kualitas sumber daya manusia yang baik merupakan salah satu kunci utama dalam pendorong proses pembangunan. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator yang mengukur taraf hidup masyarakat. Menurut Sukirno (2006) indeks

pembangunan manusia sangat berperan dalam pembangunan perekonomian karena dengan pembangunan sumber daya manusia yang baik dapat memaksimalkan berbagai faktor produksi yang ada pada suatu wilayah. Indeks pembangunan manusia yang baik di suatu wilayah akan menyebabkan wilayah tersebut semakin maju karena kualitas sumber daya manusia wilayah tersebut baik, begitu pula sebaliknya kualitas sumber daya manusia pada daerah tertinggal cenderung rendah, hal tersebut akan menyebabkan ketimpangan pembangunan.



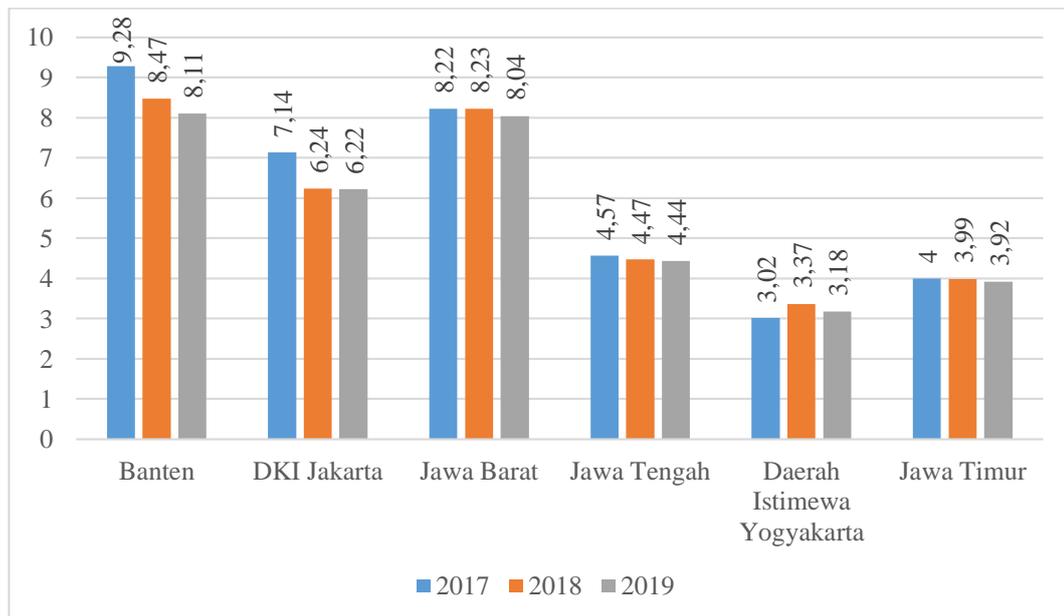
Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Enam Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2017-2019

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Gambar 1.3 menunjukkan indeks pembangunan manusia pada enam Provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2017-2019 terus mengalami kemajuan setiap tahunnya yang mengindikasikan sumber daya manusia semakin membaik. Pada tahun 2017-2019, indeks pembangunan manusia paling tinggi yaitu provinsi DKI Jakarta yang berada pada kategori status pembangunan sangat tinggi yaitu melebihi angka 80 dan indeks pembangunan manusia paling rendah yaitu provinsi Jawa

Timur tetapi masih berada pada kategori status pembangunan tinggi yaitu lebih dari 70 dan kurang dari 80.

Selain aglomerasi dan indeks pembangunan manusia, faktor yang dapat mempengaruhi ketimpangan lainnya adalah tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran merupakan persentase dari jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin besar tingkat pengangguran di suatu wilayah berarti akan menurunkan tingkat produktivitas dan akan memicu menurunnya pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Pengangguran akan berdampak terhadap kehidupan sosial dengan kriminalitas yang tinggi hal itu akan mengakibatkan pembangunan ekonomi terhambat.



Gambar 1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Enam Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2017-2019

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Berdasarkan Gambar 1.4, tingkat pengangguran paling tinggi terdapat di Provinsi Jawa Barat dan mengalami fluktuasi, sementara tingkat pengangguran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan tingkat pengangguran paling

rendah di Pulau Jawa dan mengalami tren fluktuasi. Pada provinsi lainnya, tingkat pengangguran pada tahun 2017-2019 cenderung menurun.

Ketimpangan pembangunan akan menjadi suatu permasalahan serius yang dihadapi, kualitas indeks pembangunan manusia yang semakin membaik dan tingkat pengangguran yang cenderung menurun ternyata masih belum mengindikasikan pembangunan yang merata. Serta terdapatnya pemusatan kegiatan ekonomi yang menjadi pemicu adanya ketimpangan pembangunan. Adapun bentuk hubungan dari faktor tersebut perlu diteliti lebih lanjut. Apabila faktor-faktor tersebut mampu membawa kebaikan dalam pengurangan ketimpangan pembangunan maka hal ini dapat menjadi acuan pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Berdasarkan latar belakang yang tersaji, penulis melakukan penelitian dengan topik ketimpangan pembangunan yang berjudul **“Analisis Determinan Ketimpangan Pembangunan di Pulau Jawa Tahun 2015-2019”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh aglomerasi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran secara parsial terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa tahun 2015-2019?
2. Bagaimana pengaruh aglomerasi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran secara bersama-sama terhadap tingkat ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa tahun 2015-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. mengetahui pengaruh aglomerasi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran secara parsial terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa tahun 2015-2019 dan
2. mengetahui pengaruh aglomerasi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran secara bersama-sama terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa tahun 2015-2019.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak. Adapun kegunaan yang diharapkan antara lain:

1. Bagi peneliti dan pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi peneliti dan pembaca mengenai ketimpangan pembangunan serta dapat mengkaji dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan. Kemudian sebagai indikator untuk mengembangkan kemampuan dalam melakukan penelitian bagi peneliti.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengambil langkah kebijakan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengatasi ketimpangan wilayah antar provinsi di Pulau Jawa.

3. Bagi Peneliti Lain

Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya atau diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori yang akan dilakukan di kemudian hari.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada enam provinsi di Pulau Jawa melalui pengambilan data dari Badan Pusat Statistik dan jurnal-jurnal yang menyajikan data-data valid dan terpercaya mengenai perekonomian Indonesia.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini dibuat dengan tujuan agar penelitian dapat dilakukan sesuai dengan matriks yang direncanakan. Penelitian ini dimulai pada bulan Oktober 2021 yang diawali dengan pengajuan judul, penyusunan usulan penelitian, seminar usulan penelitian, revisi usulan penelitian, penyusunan skripsi, dan diakhiri dengan sidang skripsi. Penelitian ini selesai pada bulan April 2022. Adapun jadwal penelitian sebagai berikut:

